

**PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PILKADA PROVINSI SUMATERA
SELATAN 2018 DENGAN PILPRES 2019 DI KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

**OLEH :
SATRIA PRIMA
NIM : 1657020116**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
1442 H/ 2021**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
UJIAN MUNAQOSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Satria Prima, NIM. 1657020116 yang berjudul *“Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 Dengan PILPRES 2019 Di Kota Palembang”* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

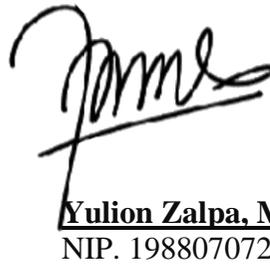
Palembang, 22 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si
NIP. 197401232005011004

Pembimbing II



Yulion Zalpa, MA
NIP. 19880707201903101

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Satria Prima
NIM : 1657020159
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : *Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada
PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 Dengan PILPRES
2019 Di Kota Palembang*

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021

Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah FISIP UIN Raden Fatah

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Program Starata I (SI) pada jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 08 Juni 2021

Dekan,



Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP. 19620621988031001

TIM PENGUJI

KETUA,

Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197612072007011010

PENGUJI I,

Dr. Eri Yusnita, S.Ag, M.HI
NIP. 197409242007012016

SEKRETARIS,

Ryllian Chandra Eka Viana M.A
NIP. 198604052019031011

PENGUJI II,

Erik Darmawan, M.HI
NIDN. 0217057402

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satria Prima

NIM : 1657020116

Tempat Tanggal Lahir: Sungai Naik, 22-06-1997

Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang

Judul Skripsi : Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 Dengan PILPRES 2019 Di Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahannya yang ditetapkan.
2. Skripsi Yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 16 Maret 2021



Satria Prima
1657020116

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“FAITH AND ACTION

**Jika Kita Mempunyai Keinginan Yang Besar, Maka Alam Semesta
Akan Bahu-Membahu Untuk Mewujudkannya”**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, Skripsi ini
kupersembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta Ibu dan Almarhum Ayah Nenek dan Kakek yang selalu mencurahkan kasih sayangnya kepadaku
2. Kakakku Saprawi Rahima Kumullah. S.Pd yang selalu memberikan support dan dukungan selama kuliah
3. Adikku Mutiara Astridiani, Annisa Uswatun Nabilah dan Annas Ya Ahdalladzi yang membuat semangat untuk menjemput kesuksesan
4. Keluarga besarku yang selalu mendukungku Wabilkhusus kepada kakanda Harizon Mansyur yang selalu memberikan support dan dukungan
5. Dosen-dosen yang telah membantu dan memberikan ilmu Wabilkhusus Pembimbing Skripsi Ku Bapak Dr. Yenrizal Tarmidzi, M.Si dan Bapak Yulion Zalpa. M.A
6. Sahabat-sahabatku tercinta Ilmu Politik Angkatan 2016 UIN Raden Fatah
7. Sahabat Perjuangan Ahmad Kurniawan dan Keluarga Besar
8. Sahabat Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2020
9. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 dengan Pilpres 2019 di Kota Palembang”, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Tak lupa pula, penulis kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini pula disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, terutama orang tuaku Ibundaku tercinta yang telah berjasa, senantiasa mendoakan, melimpahkan kasih sayang, membimbing, memberikan pendidikan dan selalu menjadi penyemangat hidup ini untuk terus melangkah.

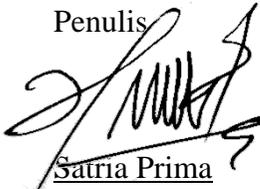
Sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada yang saya hormati:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.AG., M.SI. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Yenrizal, M.Si juga sebagai Pembimbing I yang telah memberikan motivasi serta bimbingan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Wakil Dekan II Bapak Ainur Rofik, M.Si
5. Wakil Dekan III Bapak Dr. Kun Budiarto, M.Si
6. Ibu Dr. Eti Yusnita, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik
7. Bapak Rylion Chandra Eka Viana M.A selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Politik
8. Bapak Yulion Zalpa, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, saran, dan motivasi dalam meyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Mifta Farid, M.Ikom Selaku dosen pembimbing akademik
10. Dosen-dosen Prodi Ilmu Politik yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat serta nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Masyarakat Kota Palembang, Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder terkait yang telah bersedia mebanu memberikan informasi untuk penelitian Skripsi ini.
12. Partner diskusi Ahmad Kurniawan
13. Sahabat Perjuangan DEMA UIN Raden Fatah 2020
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Ilmu Politik UIN Raden Fatah.

Pada akhirnya penulis hanya berharap semoga Allah SWT akan membalas semua jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis



Satria Prima

NIM. 1657020116

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Moto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	9
1. Perbandingan Politik.....	9
2. Partisipasi	9
3. Partisipasi Politik	10
4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	10
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	11
G. Metodologi Penelitian.....	12
1. Pendekatan/metode penelitian	13
2. Data dan Sumber data	13
3. Teknik pengumpulan data.....	14
a) Wawancara	14
b) Kuesioner	14
c) Dokumen	14
4. Lokasi penelitian.....	15
5. Teknik analisis data.....	15
H. Sistematika Penulisan Laporan.....	15

BAB II DINAMIKA PEMILU DAN PARTISIPASI	
MASYARAKAT	17
A. Dinamika Pemilu dan Persoalan-Persoalan yang Timbul .	17
B. Pemilu Langsung dan Partisipasi Masyarakat	20
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Sejarah Sumatera Selatan	25
1. Gambaran Umum Sumatera Selatan	25
2. Letak Geografis.....	26
3. Kependudukan	28
4. Visi dan Misi Sumatera Selatan.....	30
B. Gambaran Umum KPU dan Bawaslu Sumatera Selatan ...	32
1. KPU Sumatera Selatan.....	32
a) Visi KPU Sumatera Selatan	33
b) Misi KPU Sumatera Selatan.....	33
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	35
a) Visi Bawaslu Sumatera Selatan.....	35
b) Misi Bawaslu Sumatera Selatan.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Partisipasi Masyarakat Kota Palembang Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan PILPRES 2019.....	38
B. Kecenderungan Persepsi Masyarakat Terkait Perbedaan Partisipasi Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan PILPRES 2019	49
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA Provinsi Sumsel Tahun 2018	3
Tabel 1.2	Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada PILPRES 2019 Provinsi Sumatera Selatan.....	4
Tabel 1.3	Bentuk Partisipasi Politik.....	10
Tabel 3.1	Luas Wilayah Provinsi Sumsel 2015-2019.....	27
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Provinsi Sumsel 2016-2020.....	29
Tabel 4.2	Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA Provinsi Sumsel Tahun 2018	38
Table 4.2	Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada PILPRES 2019 Provinsi Sumatera Selatan.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Sumatera Selatan	27
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Selatan ..	33
Gambar 3.3 Struktur Organisasi BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan.....	35
Gambar 4.1 Sosialisasi ke sanggar senam	41
Gambar 4.2 Sosialisasi ke Panti Sosia	42
Gambar 4.3 Sosialisasi ke Pedestrian Sudirman.....	43
Gambar 4.4 Sosialisasi Sekaligus Konser Musik di Kambang Iwak	44
Gambar 4.5 Sosialisasi Begesah Peh	47
Gambar 4.6 Apel Siaga Pengawas Pemilu 2019.....	48
Diagram 4.1 Responden Daerah Pemilihan	49
Diagram 4.2 Partisipasi Pemilih Pilkada Sumsel 2018.....	51
Diagram 4.3 Alasan Tidak Berpartisipasi Pilkada 2018	51
Diagram 4.4 Alasan Ikut Berpartisipasi Pilkada 2018	52
Diagram 4.5 Partisipasi Pemilih Pada Pilpres 2019	52
Diagram 4.6 Alasan Tidak Berpartisipasi Pilpres 2019.....	53
Diagram 4.7 Alasan Ikut Berpartisipasi Pilpres 2019	53

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 Dengan Pilpres 2019 Di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang lebih tinggi pada saat Pilpres 2019 daripada Pilkada Provinsi 2018. Penelitian ini menggunakan teori Perbandingan Politik dan Partisipasi Politik Miriam Budiardjo. Miriam Budiardjo partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini wawancara terhadap Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder terkait seperti Pengamat Politik, Tokoh Parpol dsb. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini didapat melalui berbagai penelitian terdahulu, jurnal, serta berita atau laporan yang terkait dengan partisipasi masyarakat kota Palembang pada Pilpres 2019 Dan Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data agar dapat melihat kecenderungan persepsi masyarakat dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain daripada kerja keras penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ada faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres 2019 yakni peran Partai Politik yang sangat massif.

Kata Kunci: Perbandingan Politik, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum

ABSTRACT

This study is titled Comparison of The Level of Political Participation of The People in the South Sumatra Provincial Election 2018 With the 2019 Presidential Election In Palembang. The purpose of this research is to find out why the participation rate of Palembang city community is higher at the time of the 2019 presidential election than the 2018 provincial elections. This study uses the theory of Political Comparison and Political Participation Miriam Budiardjo. Miriam Budiardjo political participation is the activity of a person or group of people to participate actively in political life by choosing the head of state directly or indirectly influence government policy (public policy). These activities include actions such as voting in elections, attending public meetings, holding contacting or lobbying relationships with government officials or MPs, becoming a party member or one of the social movements with direct action and so on. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The primary data source in this study was interviews with election organizers and related stakeholders such as Political Observers, Political Figures etc. While the secondary data from this study was obtained through various previous researches, journals, as well as news or reports related to the participation of Palembang city people in the 2019 Presidential Election and South Sumatra Provincial Elections 2018. Data collection in this study was conducted through interview techniques, questionnaires used to collect data in order to see the tendency of public perception and documents. The results of this study show that in addition to the hard work of election organizers in conducting socialization and education of voters there is a very big factor influence on the level of public participation in the 2019 presidential election, namely the role of a very massive Political Party.

Keywords: Political Comparison, Political Participation, General Election

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa.

Perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah, masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemilu hanya sebagai agenda rutinitas lima tahunan yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anggapan seperti ini tentunya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih baik dalam melaksanakan agenda pemilu di masa yang akan datang (Triono, 2017: 156-157).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum salah satunya penyelenggara pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi Undang-Undang tentang pemilihan umum pasca orde baru dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 6 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilihan umum.

Badan-badan tersebut terdiri atas:

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
- 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota
- 4) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- 5) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 6) Pemungutan suara luar negeri (PPLN)
- 7) Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- 8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) (Legality, 2017: 9).

Sebagai penyelenggara pemilihan umum ditingkat Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan agenda PEMILU dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Kegiatan warga negara biasa dibagi dua mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik (Budiardjo, 2008: 367-368).

Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka

partisipasi politik menjadi pasif dan apatis (Rahmadani, Skripsi, 2010:2-3).

Table 1.1
Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA Provinsi
Sumsel Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih (DPT)			Penggunaan Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)			Tingkat Partas (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Total
1	Kota Palembang	550.218	563.031	1.113.249	375.368	407.624	782.992	68,22	72,40	70,31
2	Kab OKI	245.042	231.821	476.863	188.283	186.405	374.688	76,84	80,41	78,62
3	Kab OI	141.150	140.582	281.732	91.542	100.801	192.343	64,85	71,70	68,28
4	Kab OKUT	232.171	223.231	455.402	178.815	177.851	356.666	77,02	79,67	78,34
5	Kab OKU	125.565	121.278	246.843	81.036	82.560	163.596	64,54	68,08	66,31
6	Kab OKUS	131.873	122.931	254.804	88.924	83.445	172.369	67,43	67,88	67,66
7	Kab Muara Enim	204.743	202.311	407.054	146.690	154.145	300.835	71,65	76,19	73,92
8	Kota Prabumulih	62.539	64.206	126.745	46.100	50.627	96.727	73,71	78,85	76,28
9	Kab PALI	60.301	60.881	121.182	38.331	42.978	81.309	63,57	70,59	67,08
10	Kab Lahat	148.024	144.307	292.331	108.894	111.505	220.399	73,57	77,27	75,42
11	Kab Empat Lawang	99.520	95.812	195.332	70.200	69.268	139.468	70,54	72,30	71,42
12	Kota Pagaram	51.859	50.023	101.882	43.872	42.563	86.435	84,60	85,09	84,84
13	Kab Musi Rawas	141.689	136.950	278.639	81.147	86.203	167.350	57,27	62,94	60,11
14	Kota Lubuklinggau	76.628	78.525	155.153	54.957	59.841	114.798	71,72	76,21	73,96
15	Kab Muratara	71.764	71.625	143.389	38.645	40.400	79.045	53,85	56,40	55,13
16	Kab Musi Banyuasin	220.559	212.690	433.249	135.898	139.965	275.863	61,62	65,81	63,71
17	Kab Banyuasin	290.478	282.306	572.784	200.428	205.387	405.815	69,00	72,75	70,88
	TOTAL	2.854.123	2.802.510	5.656.633	1.969.130	2.041.568	4.010.698	68,99	72,85	70,90

Sumber : PPID KPU Provinsi Sumatera Selatan

Table 1.2
Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada PILPRES 2019 Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih (DPT)			Penggunaan Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)			Tingkat Partas (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Total
1	Kota Palembang	557.261	568.826	1.126.087	448.711	476.834	925.545	80,52	83,83	82,17
2	Kab OKI	268.604	254.665	523.269	223.313	219.069	442.382	83,14	86,02	84,58
3	Kab OI	144.924	144.049	288.973	122.685	126.442	249.127	84,65	87,78	86,22
4	Kab OKUT	247.890	239.234	487.124	207.034	202.848	409.882	83,52	84,79	84,15
5	Kab OKU	131.010	127.052	258.062	110.656	108.768	219.424	84,46	85,61	85,04
6	Kab OKUS	139.139	129.960	269.099	118.562	109.200	227.762	85,21	84,03	84,62
7	Kab Muara Enim	209.915	207.611	417.526	178.838	180.216	359.054	85,20	86,80	86,00
8	Kota Prabumulih	64.536	66.655	131.191	55.625	59.265	114.890	86,19	88,91	87,55
9	Kab PALI	65.308	66.268	131.576	55.505	58.092	113.597	84,99	87,66	86,33
10	Kab Lahat	150.592	146.422	297.014	130.343	128.922	259.265	86,55	88,05	87,30
11	Kab Empat Lawang	101.957	98.468	200.425	85.349	83.721	169.070	83,71	85,02	84,37
12	Kota Pagaralam	53.319	51.203	104.522	46.867	45.463	92.330	87,90	88,79	88,34
13	Kab Musi Rawas	147.171	142.373	289.544	125.283	122.782	248.065	85,13	86,24	85,68
14	Kota Lubuklinggau	79.449	81.436	160.885	65.656	69.432	135.088	82,64	85,26	83,95
15	Kab Muratara	74.488	74.190	148.678	62.747	63.191	125.938	84,24	85,17	84,71
16	Kab Musi Banyuasin	229.124	220.730	449.854	186.967	183.106	370.073	81,60	82,95	82,28
17	Kab Banyuasin	300.992	292.754	593.746	238.654	238.439	477.093	79,29	81,45	80,37
	TOTAL	2.965.679	2.911.896	5.877.575	2.462.795	2.475.790	4.938.585	83,04	85,02	84,02

Sumber : PPID KPU Provinsi Sumatera Selatan

Tabel diatas menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan agenda PEMILU. Salah satu indikator suksesnya

agenda Pemilu yaitu dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas. Dari 17 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan biasanya yang menjadi sorotan selalu Ibukota Palembang, berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sumatera Selatan bahwa Ditahun 2018 Partisipasi Pemilih Masyarakat Kota Palembang dalam Pilkada Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu (27/6/2018) yaitu 70,31%, sedangkan pada saat PILPRES 2019 partisipasi masyarakat lebih tinggi yang mana angka partisipasi tersebut mencapai 82,17%.

Didalam istilah pemilihan umum serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu. Pemilihan umum merupakan bagian dari pertama yang ada di Indonesia dalam sejarah, selain itu tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum tahun 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Pemilihan umum tersebut yang menggabungkan Pileg dan Pilpres menjadi satu pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Perbedaan tersebut menyertai teknis penyelenggaraan yang dilakukan, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan yang matang, ketersediaan aparatur penyelenggara yang cukup dan memiliki kompeten, serta dukungan sistem yang baik (Rumah Pintar Pemilu Kaltim, 2019: 1-3).

Dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa, Huda, (2018: 550) mengatakan, kehidupan masyarakat pada saat ini selalu menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Tak terkecuali dalam hal memilih pemimpin. Masyarakat sudah pastinya menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa. Namun, seringkali masyarakat mengartikan tindakan para penguasa dan elite politik hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Misalnya pada masa kampanye, pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan hati rakyat dengan berbagai cara. Dalam konteks ini yang terjadi adalah budaya *money politic* dan penyebaran isu-isu yang belum

tentu kebenarannya sering kali dipraktikan oleh para pejabat. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa pilpres tahun 2019 ini adalah *rematch* atau tanding ulang Pilpres tahun 2014.

Berdasar latar belakang masalah inilah, menurut saya sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam *Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 Dengan Pilpres 2019 Di Kota Palembang*.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Mengapa tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang lebih tinggi pada PILPRES 2019 daripada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang lebih tinggi pada PILPRES 2019 daripada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat berguna bagi kajian Ilmu Politik dan menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai Studi Komparasi atau Perbandingan tingkat Partisipasi Politik pada PILKADA dan PILPRES.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap Perbandingan tingkat Partisipasi Politik.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah teori- teori yang menjadi landasan dalam penelitian, selain itu kajian pustaka juga melalui jurnal-jurnal penelitian nasional. Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung

terhadap kajian teori didalam penelitian yang sedang dilakukan, peneliti sangat memerlukan referensi atau acuan dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Referensi yang dirujuk merupakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Skripsi Yang Disusun Oleh M. Ichsan Bayunta Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara “Studi Komparasi Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dan Indonesia Pasca Reformasi”. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan normatif dan menggunakan analisis deskriptif analisis. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari berbagai literature seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system pemilihan umum presiden di Indonesia pasca reformasi dan amerika serikat sama sama memiliki kelebihan dan kekurangan dalam system pemilihan umum Presidennya.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Yosi Witria Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah berjudul “Peran Relawan KPU di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019” Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini satu orang ketua kelompok dari setiap segmen. Dari penelitian ini diketahui bahwa landasan terbentuknya program “Relasi” adalah partisipasi yang cenderung menurun.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rahma Dani Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data berupa: metode observasi metode wawancara metode dokumentasi. Pengambilan data pada responden pemilih pemula di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan aktivis politik sebagai informan penelitian. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal terbagi dalam bentuk pemberian suara, kampanye, dan berbicara masalah politik.

Selanjutnya Penelitian Yang Dilakukan Oleh Ahmad Sahid Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman berjudul “Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru Dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser)” data penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif dan analisis kuantitatif menggunakan analisis cross tab (tabulasi silang). Setelah menggunakan rangkaian analisis kualitatif dan kuantitatif temuan dari penelitian ini adalah perbedaan tingkat partisipasi politik antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot yang menunjukkan perbandingan partisipasi politik dalam kegiatan kampanye dan menggunakan hak pilih.

Berikutnya Penelitian Yang Dilakukan Oleh Adhitya Oktayudiarta Saswoyo Putra Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro berjudul “Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Grobogan Dalam PemiluKada Kabupaten Grobogan 2011 Dan PemiluKada Jawa Tengah 2013”. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui perbedaan tingkat partisipasi pada PemiluKada Kab.Grobogan 2011 dan PemiluKada Jawa Tengah 2013, juga untuk membandingkan sejauh mana tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat di Kab.Grobogan dalam PemiluKada Kab.Grobogan 2011 dan PemiluKada Jawa Tengah 2013 di Kab.Grobogan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Pengumpulan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner melalui studi kepustakaan serta pengolahan dan analisis data berupa metode kuantitatif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki perilaku memilih lebih besar pada Pilbup 2011 yaitu 72%, sedangkan pilgub 2013 hanya 44%. Hal tersebut disebabkan

karena Pilbuk lebih direct menyangkut kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Dari kelima tinjauan pustaka tersebut tentunya menjadi referensi atau acuan dari hasil-hasil penelitiannya. Referensi yang dirujuk merupakan penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Namun yang menjadi pembeda penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni objek dan subjek penelitian yang difokuskan kepada Komparasi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Selatan Pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 Dengan Pilpres 2019.

F. Kerangka Teori

1. Perbandingan Politik

Menurut Ronald H.Chilcote (2007:04) Perbandingan Politik (*comparative politics*) mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan antara lain adalah suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi dan berbagai perserikatan.

Dalam konteks ilmu pemerintahan, S. Pamudji dalam Dede Mariana (2001:01) mengatakan bahwa kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu objek atau beberapa objek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan, yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa objek, dimana untuk keperluan tersebut objek atau objek-objek yang disejajarkan dengan alat pembandingannya, dari pengertian ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objek disejajarkan dengan alat pembandingannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding.

2. Partisipasi

Menurut UNDP dalam Haris (2007 : 57) Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-

bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi yang dilakukan warga negara tidak hanya pada tahapan implementasi/pelaksanaan, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan/formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

3. Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo (2008 : 367) secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya.

4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Tarech Rasyid (2017: 97) Bentuk-bentuk partisipasi politik di berbagai negara sangat beragam, baik dalam bentuk konvensional maupun bentuk non-konvensional. Partisipasi politik konvensional dan non-konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, kecuali tindak kekerasan politik baik terhadap manusia maupun harta benda. Namun, secara umum ada jenis partisipasi politik yang aktif, misalnya mengajukan usul suatu kebijakan tertentu. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Bentuk Partisipasi Politik

No	Konvensional	Non-konvensional
1	Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
2	Diskusi politik	Berdemonstrasi
3	Kegiatan kampanye	Konfrontasi
4	Membentuk kelompok kepentingan	Mogok
5	Komunikasi individual dengan pejabat politik	Tindakan kekerasan politik harta benda

6	-	Tindakan kekereasan politik terhadap manusia
7	-	Perang grilya dan revolusi

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Jeffrey M. Paige dalam Surbakti (2007:144) , menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan ekonomi, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut kepercayaan kepada pemerintah bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Menurut Weimer (dalam Sastroatmojo, 1995:91) setidaknya ada lima penyebab yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

- a) Modernisasi disegala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.
- b) Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik.
- c) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarkan

seluruh ide-ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.

- d) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan menyuarakan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu-isu kebebasan pers.
- e) Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Hal lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat juga disebabkan soal ketimpangan yang muncul dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum Pemilu termasuk juga metode kampanye, jika metode kampanye dalam pemilu banyak diisi oleh informasi hoaks yang mengarah kepada kampanye negative, dikhawatirkan partisipasi masyarakat akan menurun.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika dibelakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi (Kothari, 1990: 8).

Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Rachmat, 2009). Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini nantinya akan dapat membantu penulis dalam menjawab pernyataan-pernyataan mengenai keadaan objek atau subjek tertentu secara rinci. Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu dimana Penelitian ini bersifat *comparative* yang membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru.

2. Data dan Sumber Data

a) Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data Kualitatif. Menurut Sutopo data kualitatif sangat berkaitan pada kualitas. Penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Untuk mendapatkan data yang lengkap sumber data menjadi sangat penting agar penelitian menghasilkan pemahaman simpulan yang tepat (Sutopo, 2002: 48).

b) Sumber Data

Sumber-sumber data penelitian ini didapat dari:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara terhadap Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder seperti Pengamat Politik dan Tokoh Partai Politik yang mengapa tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang lebih tinggi pada PILPRES 2019 daripada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui berbagai penelitian terdahulu, jurnal, serta berita atau laporan yang terkait dengan partisipasi

masyarakat kota Palembang pada PILPRES 2019 dan PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018

3. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara sebagai instrumen utama dan studi dokumen sebagai instrumen pendukung.

a) Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dan menggali informasi secara mendalam mengenai tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang lebih tinggi pada PILPRES 2019 daripada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti sudah terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara yang berisi garis besar pertanyaan saja. Selanjutnya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.

b) Kuesioner

Kuesioner ini bukan mewakili seluruh masyarakat Kota Palembang, namun kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data agar dapat melihat kecenderungan persepsi masyarakat terkait perbedaan partisipasi pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan PILPRES 2019.

c) Dokumen

Dokumen ini sebagai pelengkap dan dokumen-dokumen yang diharapkan dapat menjadi sumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin ditanyakan melalui wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani, yang berupa dokumen dan rekaman sedangkan “dokumen” digunakan untuk mengacu setiap tulisan atau selain “rekaman” yaitu yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah di tetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Adapun lokasi penelitian dari penelitian ini adalah Masyarakat Kota Palembang Sumatera Selatan dengan sumber data pada instansi terkait khususnya KPU/Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yang menjelaskan dan menganalisis data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil dikumpulkan penulis, kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas tetapi lebih kepada upaya mencari pemahaman.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan proposal haruslah sesuai dengan sistematika penyusunan penulisan secara menyeluruh berdasarkan garis besar penelitiannya, agar mempermudah penulis dalam membuatnya. Penelitian ini terdiri atas empat bab antara lain :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, jenis penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik analisa data, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : Kajian Kepustakaan

Pada bab ini berbeda dengan Kerangka Teori pada Bab I. Bab ini lebih fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang fokus masalah yang diangkat atau juga bisa menjelaskan tentang isu terkini dari topik yang dibahas.

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Bab ini berisi penjelasan singkat mengenai Lokasi penelitian yang akan atau yang telah dilakukan pengambilan data, serta alasan peneliti memilih lokasi tersebut.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, dibahas mengenai proses analisis dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Bagaimana keterkaitan penelitian dengan teori yang sudah ada serta bagaimana peneliti menjelaskan hasil penelitiannya berdasarkan sudut pandang teoritis.

BAB V : Penutup

Bab yang terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian dan diskusi. Dan saran berisi tentang saran yang dikemukakan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan diskusi.

BAB II

DINAMIKA PEMILU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Dinamika Pemilu dan Persoalan-Persoalan yang Timbul

Dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan sejalan dengan perubahan perpolitikan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) pada awalnya dilakukan untuk mencari anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk Presiden pada awalnya dipilih oleh MPR. Munculnya partai politik secara resmi berawal dari maklumat 3 November Tahun 1945 Tentang Pembentukan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta yang diawal pembentukannya ini, Maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya (Iqbal dan Nasution, 2015: 294).

Lahirnya berbagai macam partai politik menjadi awal perkembangan demokrasi di Indonesia, karena partai politik adalah salah satu syarat berjalannya sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem inilah Indonesia menampung banyak partai (Multi Partai) yang akan ikut serta dalam Pemilu Pertama Tahun 1955. Kemudian terjadi pemangkasan terhadap partai politik pada masa Orde Baru, sehingga hanya ada dua partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Selain kedua partai tersebut, muncul organisasi yang berperan sangat aktif dalam perpolitikan saat itu yakni Organisasi Kekaryaannya atau Golongan Karya.

Golongan Karya pada masa Orde Baru memainkan peran politik yang sangat dominan. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah (Soeharto) membuat pengaruh Golkar sangat besar dikalangan masyarakat dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kejayaan Golkar di masa Orde Baru sebagai salah satu kelompok yang mendominasi dan memimpin, membuat Golkar begitu berbeda dengan partai politik lain. Terus memimpin dan mendominasi selama dua puluh tujuh tahun menunjukkan adanya hegemoni Golkar dalam perpolitikan di masa Orde Baru. Seiring berjalannya waktu akhirnya sebuah rezim yang telah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa dan didukung oleh kekuatan militer serta

segala infrastrukturnya ternyata tumbang ditangan gerakan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa (People Power). Soeharto akhirnya jatuh dari kekuasaan tanggal 21 Mei 1998 (Iqbal dan Nasution, 2015: 319).

Memasuki Era Reformasi dan lengsernya Era Orde Baru Pemilu kembali diadakan tahun 1999 dengan menggunakan Asas Jurdil yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Adil berarti tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi terhadap peserta dan pemilih tertentu. Selanjutnya Pemilu 2004 yang diadakan pada tanggal 5 April 2004. Ini adalah pertama kalinya Pemilu benar-benar "dibuka" untuk umum. Pada masa ini Para peserta Pemilu dipilih langsung oleh rakyat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu pada tahun ini diadakan 3 kali yakni pada tanggal 5 April 2004 yang diadakan untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, tanggal 5 Juli 2004 untuk pemilihan Presiden putaran I, dan pada tanggal 20 September 2004 untuk pemilihan Presiden putaran II. Pemilu tahun 2004 dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia.

Kemudian Pemilu tahun 2009 Ini adalah Pemilu ketiga dimasa Reformasi, merupakan Pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kedua setelah Pemilu tahun 2004. Pada Pemilu tahun ini menggunakan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (LUBERJURDIL). Dasar Hukum. 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat ketentuan baru yakni pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai pemenang mutlak dalam Pemilu dan tidak perlu diadakan Pemilu putaran II (www.kpu.go.id akses 20 Februari 2020).

Pemilu pada tahun 2014 juga diadakan dua kali yakni pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih Anggota DPD, DPR RI, dan DPRD. Terdapat 15 Partai Politik yang terdaftar sebagai peserta. Kemudian disusul pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu 2014 ini lah Politik Identitas mulai marak kemudian menjadi semakin banyak dan menjadi persoalan tiap tahun mendekati Pemilu 2019.

Menjelang Pemilu Presiden 2019 banyak hal yang menjadi persoalan pemilu timbul. Dugaan kampanye hitam terhadap Jokowi yang dilakukan tiga orang perempuan di Karawang. Mereka menyampaikan informasi jika Jokowi terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya, misalnya ditiadakannya azan dan dilegalkannya pernikahan sesama jenis. Hal tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Polres Karawang dengan melakukan penangkapan terhadap ketiganya. Penangkapan dilakukan pada Minggu (24/2/2019) untuk menghindari munculnya konflik yang lebih besar. Ketiga perempuan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kampanye hitam terhadap Jokowi dan dijerat pasal dalam UU ITE.

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin melaporkan Reuni Akbar 212 yang digelar pada 2 Desember 2018 di Monas, Jakarta, karena diduga ditunggangi kepentingan politik. Menurut TKN, reuni itu juga diduga menjadi ajang kampanye terselubung pihak Prabowo-Sandi, karena hadirnya sejumlah tokoh politik di sana. Mereka yang hadir di antaranya, capres nomor urut 01 Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. TKN melaporkannya ke Bawaslu Jakarta. Keputusan akhirnya, Bawaslu menyatakan tidak ditemukan adanya pelanggaran Prabowo hadir sebagai undangan, dan bukan calon presiden. Pidato yang ia sampaikan dinilai tidak mengandung unsur kampanye (<https://nasional.kompas.com/sejumlah-kasus-terkait-pemilu-2019> akses 21 Februari 2021).

Akibatnya dari kampanye hitam dan kecurangan-kecurangan yang terjadi meliputi unsur sara, ujaran kebencian, berita-berita hoax yang dimunculkan dan money politik bahkan sampai pada penggelembungan suara dan mosi tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu, muncul Isu bahwa para investor Asing tidak mau lagi berinvestasi ke Indonesia dikarenakan situasi perpolitikan yang cukup panas. Hingga pada akhirnya setelah pemilu usai kedua kubu langsung melakukan Rekonsiliasi dan

bahkan saat ini Rival Jokowi-Ma'ruf masuk dalam tatanan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud MD - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM berdasarkan laporan dari Jakarta Kompas.com, beda kecurangan pemilihan umum pada masa reformasi dengan masa Orde Baru. Secara umum, dugaan kecurangan pada masa Orba dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, pada masa reformasi dugaan kecurangan dilakukan oleh peserta pemilu. Bedanya kecurangan zaman orba itu dilakukan secara vertikal, oleh pemerintah tingkat atas sampai bawah. Kalau sekarang kecurangannya bersifat horizontal, yang curang sekarang itu peserta pemilu, bukan pemerintah lagi (<https://nasional.kompas.com/beda-kecurangan-pemilu-era-orde-baru-dan-reformasi> akses 21 Februari 2021).

Pembuktiannya pun sangat mudah, yakni dengan melihat siapa yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU digugat antar partai, Partai ini menuduh partai ini. Sekarang suara dituding antar-anggota partai. Berarti bukan pemerintah, itu bukti kecurangan bersifat horizontal. Kalaupun KPU atau Bawaslu yang curang, masih ada pengadilan yang dapat mengadili mereka yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, dalam persoalan kecurangan pemilu, sejak era reformasi pemerintah sudah tidak pernah ikut serta. Sebab, kini pemerintah tidak melakukan kecurangan secara vertikal yang telah diatur sejak pembuatan UU hingga panitia pemungutan suara. Mental berdemokrasi para peserta politik, pemilu, calon kepala daerah, presiden, legislatif, dan lainnya harus lebih sportif.

B. Pemilu Langsung dan Partisipasi Masyarakat

Pemilihan Umum (Pemilu) langsung ialah pelaksanaan pemilu secara langsung dalam memilih sehingga pemilih tidak melalui lembaga perwakilan. Untuk itu suara pemilih dapat diberikan dengan cara datang langsung ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) di daerah masing masing. Pemilu merupakan salah satu syarat dalam sebuah negara Demokrasi yang tujuannya untuk merotasi kekuasaan. Agar dapat terwujud Pemilu yang Demokratis diperlukan sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat, jika pemilih berdaulat maka negara akan kuat.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 12 kali Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "**LUBER**" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.

- "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "**Jurdil**" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilihan umum (<https://id.wikipedia.org/Pemilihan-umum-di-Indonesia> akses 22 Februari 2021).

Setiap diselenggarakan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu pasti menargetkan angka persentase partisipasi masyarakat. Besar kecilnya angka persentase partisipasi masyarakat tersebut tentunya tidak akan pernah terlepas dari Dinamika Politik pada Pemilihan Umum, dinamika itulah yang membentuk sebuah perubahan baik skala kecil maupun besar sehingga berdampak pada masyarakat.

Secara umum partisipasi politik di definisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung

memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya (Budiardjo, 2008 : 367) .

Pada saat pemilu pertama kali digelar tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi bahkan hampir mencapai 100 persen, dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Namun ada hal yang menjadi persoalan di era reformasi yaitu tingkat partisipasi masyarakat menurun. Beberapa hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat juga disebabkan soal ketimpangan yang muncul dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum Pemilu termasuk juga metode kampanye, jika metode kampanye dalam pemilu banyak diisi oleh informasi hoaks, isu sara dan ujaran kebencian yang mengarah kepada kampanye negative, dikhawatirkan partisipasi masyarakat akan menurun.

Mencermati pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, salah satu hal menariknya adalah partisipasi masyarakat yang meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Hal ini (kemungkinan) bisa jadi penanda demokrasi di Indonesia semakin matang (karena partisipasi menjadi salah satu aspek penting dalam demokrasi). Atau ada ketertarikan dan antusiasme masyarakat terhadap Pemilu 2019 yang baru pertama kali dilaksanakan serentak dengan memilih presiden/wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kehadiran atau jumlah pemilih merupakan salah satu indikator penting kepercayaan masyarakat atas proses demokrasi di sebuah negara dan bentuk partisipasi riil warga atas masa depan bangsanya. Tingginya jumlah suara pemilih juga menandakan masyarakat punya harapan besar terhadap demokrasi. Sebaliknya jumlah pemilih rendah banyak dikaitkan dengan sikap pemilih apatis yang menandakan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada proses politik di negaranya.

Secara nasional, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 yaitu 81 persen lebih atau meningkat hampir 10 persen jika dibandingkan pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014 partisipasi pilpres sebesar 70 persen sementara pileg 75 persen. Jumlah pemilih Pemilu 2019 (di dalam dan luar negeri) mencapai 199.987.870, sementara terdapat 158.012.506 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau mencapai kisaran 81 persen (www.kpu.go.id akses 22 Februari 2021).

Layaknya gelaran demokrasi, pemilu juga selalu dinaungi kekhawatiran akan tingginya angka golput. Juga di Pemilu 2019 yang dibayangi kekhawatiran apatisnya masyarakat akan penentuan pemimpinnya, apalagi pemilu edisi ke-12 tergolong lebih rumit jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pun jauh hari sudah dilakukan oleh pemerintah maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu. *Pertama*, Pemerintah membuat kebijakan memperpanjang masa perekaman data KTP elektronik (KTP-el) dan memberikan kemudahan bagi warga yang belum mempunyai KTP-el dengan menerbitkan surat keterangan (suket) sebagai syarat mencoblos.

Kedua, KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menjangkau beragam kelompok masyarakat. Melalui program Relawan Demokrasi (Relasi) KPU menysasar 10 basis pemilih mulai dari keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga internet. Khusus pemanfaatan media sosial, dilakukan sebagai strategi sosialisasi karena mudah, murah, efektif, cepat juga memegang peran penting.

Ketiga, Upaya mendongkrak partisipasi juga disumbang oleh peserta pemilu itu sendiri. Terutama calon presiden dan wakil presiden yang berkampanye sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019 . Pengerahan dan konsolidasi pendukung masing-masing calon diyakini juga jadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan partisipasi pemilih. Dan ini terlihat semakin masif diakhir masa kampanye.

Keempat, upaya mengangkat partisipasi juga turut disumbang dari meningkatnya jumlah caleg perempuan dalam Pemilu 2019. Jumlah caleg perempuan (DPR) pada Pemilu 2019

mencapai 3.194 atau memenuhi kuota 30% caleg perempuan seperti yang diatur dalam Undang-undang (UU) Pemilu. Angka itu meningkat hampir 50% dari Pemilu 2014 sebesar 2.467 orang.

Banyaknya caleg perempuan yang mengusung program terkait isu perempuan dan anak (ditujukan untuk meraih simpati pemilih perempuan dan pemula) bahkan menarik minat pemilih laki-laki datang ke TPS. Hal ini banyak disebabkan isu yang dibawa juga menyinggung masalah kesehatan, keluarga, pendidikan, usaha kecil menengah. Beberapa caleg perempuan dari DPR RI bahkan rajin *blusukan*, berkampanye dengan kemasan menarik seperti menggelar pasar murah untuk mendongkrak perolehan suara.

Disamping itu, faktor negatif kemungkinan juga berperan dalam pencapaian partisipasi pemilih. Misal, masifnya praktik politik uang (*money politic*) peserta pemilu. Apalagi, hingga saat ini bukan hal mudah bagi pengawas pemilu untuk menangkap, menjerat dan mempidanakan pelaku praktik politik uang itu. Dengan telah bertransaksi politik uang, mengharuskan pemilih penerimanya datang ke TPS guna memberikan suara bagi calon yang memberi uang. Diakui atau tidak, praktik tercela itu bisa ikut memengaruhi naiknya partisipasi pemilih.

Hal negatif lain yang memengaruhi partisipasi pemilih adalah permainan data pemilih. Partisipasi pemilih ialah perbandingan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. Karena itu, ketika jumlah pemilih di DPT yang berpotensi tidak hadir di TPS berkurang, angka partisipasi meningkat (www.kpu.go.id akses 23 Februari 2021).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Sumatera Selatan

1. Gambaran Umum Sumatera Selatan

Pulau Sumatera yang dulu disebut Suvarnadwipa dalam kitab Mahayana, terletak membujur dari arah Barat-Laut ke Tenggara dan memotong garis khatulistiwa. Secara administrative pulau ini telah terbagi atas beberapa Provinsi, dan salah satunya Provinsi itu adalah Sumatera Selatan dengan Ibukota Palembang (Abdullah, 1992: 16).

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya.

Menurut sumber antropologi disebutkan bahwa asal usul manusia Sumatera bagian selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman paleolitikum dengan adanya benda-benda zaman paleolitikum pada beberapa wilayah antara lain sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lahat, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tanjung Karang yakni desa Bengamas lereng utara pergunungan Gumai, di dasar (cabang dari Sungai Musi) sungai Saling, sungai Kikim lalu di desa Tiangko Panjang (Gua Tiangko Panjang) dan desa Padang Bidu atau daerah Podok Salabe serta penemuan di Kalianda dan Kedaton dimana dapat ditemui tradisi yang berasal dari acheulean yang bermigrasi melalui sungai Mekong yang merupakan bagian dari bangsa Monk Khmer.

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di

Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri China (www.sumselprov.go.id, akses 5 Januari 2021).

2. Letak Geografis

Provinsi Sumatra Selatan secara astronomis terletak antara 1–4° Lintang Selatan dan 102–106° Bujur Timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 91592.43 km². Secara topografi, wilayah Sumatera Selatan di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukit barisan yang membelah Sumatra Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 – 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatra Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komerling, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

Gambar 3.1
Peta Wilayah Sumatera Selatan



Provinsi Bengkulu, terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibu kota provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan. Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kota madya, 212 kecamatan, 354 kelurahan, dan 2.589 desa.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Provinsi Sumsel 2015-2019

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ogan Komering Ulu	3747.77	3747.77	3747.77	3749.36	4797.06
Ogan Komering Ilir	17086.39	17086.39	17086.39	17024.47	18359.04
Muara Enim	6901.36	6901.36	6901.36	6757.86	7383.90
Lahat	4297.12	4297.12	4297.12	4226.34	5311.74
Musi Rawas	6330.53	6330.53	6330.53	6114.01	6350.10
Musi Banyuasin	14530.36	14530.36	14530.36	14453.04	14266.26

Banyuasin	12361.43	12361.43	12361.43	12472.33	11832.99
OKU Selatan	4544.18	4544.18	4544.18	4341.64	5493.94
OKU Timur	3397.10	3397.10	3397.10	3428.74	3370
Ogan Ilir	2411.24	2411.24	2411.24	2268.22	2666.09
Empat Lawang	2312.20	2312.20	2312.20	2320.50	2256.44
Pali	1844.71	1844.71	1844.71	1743.56	1840
Musi Rawas Utara	5836.70	5836.70	5836.70	5946.26	6008.55
Palembang	363.68	363.68	363.68	366.48	369.22
Prabumulih	458.11	458.11	458.11	476.80	251.94
Pagar Alam	632.80	632.80	632.80	630.83	633.66
Lubuk Linggau	365.49	365.49	365.49	380.26	401.50
Sumatera Selatan	87421.17	87421.24	87421.24	86700.68	91592.43

Sumber. BPS Provinsi Sumatera Selatan

Secara administratif Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibu kota provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan. Sumatra Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kota madya, 212 kecamatan, 354 kelurahan, dan 2.589 desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 18359.04 Km², diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14266.26 Km².

3. Kependudukan

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dengan juga melalui e-census. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal,

sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempatdimanamerekaditemukan petugas sensus pada malam ‘Hari Sensus’. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu atau rumah apung, masyarakat terpencil atau terasing, dan pengungsi.

Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang berpergian keluar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah ditempat tinggalnya, tetapi dicacah ditempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen- komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010 - 2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP 2010.

Penduduk merupakan sekelompok warga Negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang wilayah tersebut dijadikannya domisili atau wilayah sementara dan dapat juga untuk ditinggal secara menetap. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili diwilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. penambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pengurangan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk yang didukung oleh beberapa faktor.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Provinsi Sumsel 2016-2020

Kabupaten/Kota Regency/City		Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency						
1.	Ogan Komering Ulu	354 488	359 092	363 617	367 865	372 123

2.	Ogan Komering Ilir	798 482	809 203	819 570	829 800	839 625
3.	Muara Enim	609 607	618 762	627 818	636 815	645 600
4.	Lahat	397 424	401 494	405 524	409 382	413 206
5.	Musi Rawas	389 239	394 384	399 075	403 819	408 282
6.	Musi Banyuasin	620 738	629 791	638 625	647 075	655 401
7.	Banyuasin	822 575	833 625	844 175	854 628	864 510
8.	OKU Selatan	348 574	352 926	357 105	361 085	364 982
9.	OKU Timur	656 568	663 481	670 272	676 797	683 332
10.	Ogan Ilir	414 504	419 773	425 032	430 095	435 092
11.	Empat Lawang	241 336	244 312	247 285	250 009	253 272
12.	PALI	182 219	184 671	187 281	189 764	192 119
13.	Musi Rawas Utara	185 315	187 635	189 895	192 199	194 405
Kota/City						
1.	Palembang	1 602 071	1 623 099	1 643 488	1 662 893	1 681 374
2.	Prabumulih	179 563	182 128	184 425	186 834	188 929
3.	Pagar Alam	135 328	136 605	137 909	139 194	140 402
4.	Lubuk Linggau	222 870	226 002	229 224	232 229	235 189
Sumatera Selatan		8 160 901	8 266 983	8 370 320	8 470 683	8 567 923

Sumber. BPS Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Tabel 2.2 jumlah penduduk provinsi sumatera selatan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 8 160 901 - 8 567 923. Peningkatan itu lebih mendominasi Kota Palembang yang mana jumlah penduduknya terbesar di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Visi dan Misi Sumatera Selatan

Sesuai dengan visi dan misi dari Gubernur Sumatera Selatan yang terpilih melalui pilkada langsung Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2023, adalah:

a) VISI :

“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

b) MISI :

- 1) Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diparkotaan maupun pedesaan
- 2) Meningkatkan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

B. Gambaran Umum KPU dan BAWASLU Sumatera Selatan

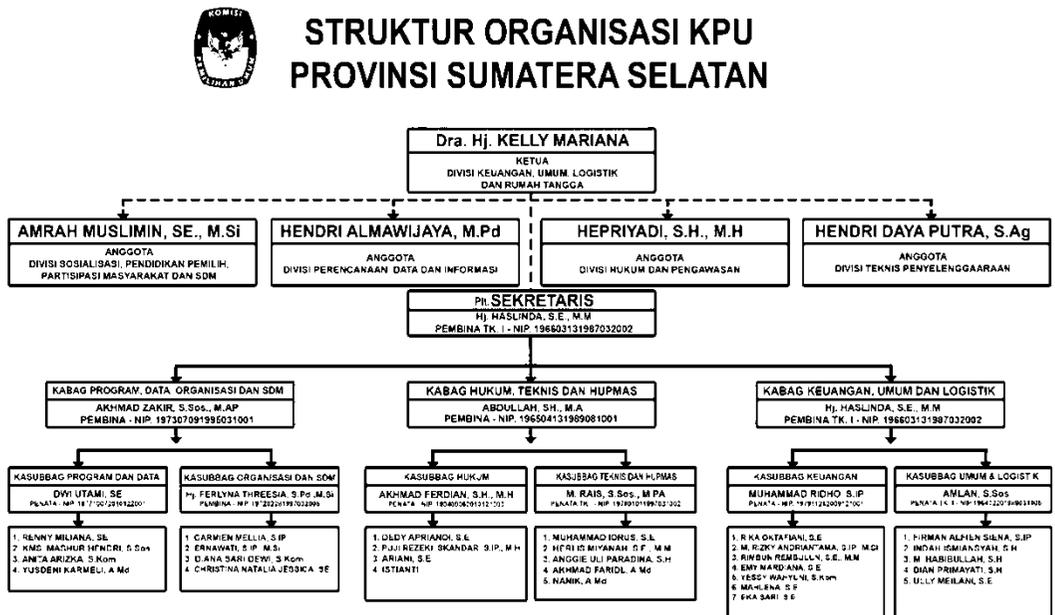
Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Namun, sejarah pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu sudah dimulai sejak tahun 1946. Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan megesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Pada Bab Pertama dijelaskan bahwa data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sumatera Selatan bahwa Ditahun 2018 Partisipasi Pemilihan Masyarakat Kota Palembang dalam Pilkada Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu (27/6/2018) yaitu 70,31%, sedangkan pada saat Pemilihan Presiden 2019 partisipasi masyarakat lebih tinggi yang mana angka partisipasi tersebut mencapai 82,17%. Tentunya untuk dapat mencapai angka partisipasi politik masyarakat tersebut adanya upaya kerja keras dari Penyelenggara Pemilu Khususnya KPU/Bawaslu.

1. KPU Provinsi Sumatera Selatan

KPU Provinsi Sumatera Selatan berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan KPU yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, tepatnya beralamat di Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang. KPU Provinsi Sumatera Selatan membawahi 17 KPU Kab/Kota yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan inilah KPU Provinsi Sumatera Selatan menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kearifan lokal.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Selatan



Bagan Organisasi KPU Sumsel

Struktur organisasi KPU Sumsel terdiri atas 5 Komisioner dan 1 Sekretaris, Ketua Komisioner membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah tangga, selanjutnya dibantu 4 Komisioner selaku anggota.

a) Visi KPU Sumatera Selatan

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBERJURDIL.

b) Misi KPU Sumatera Selatan

Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

- 1) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

- 3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- 4) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- 5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- 6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- 1) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- 3) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- 4) menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- 5) menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- 6) mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- 7) memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum (Rumah Pintar Pemilu Sumsel, 2018:7-8).

- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri (PPID Bawaslu Sumsel, 2019: 7).

Wewenang Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
- 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang Partisipasi Politik Masyarakat, mengapa tingkat partisipasi masyarakat Kota Palembang lebih tinggi pada saat Pilpres 2019 daripada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018, dengan menggunakan teori Partisipasi Politik.

A. Partisipasi Masyarakat Kota Palembang Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan PILPRES 2019

Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan Pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya Pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilu.

Table 4.1
Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA Provinsi Sumsel Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih (DPT)			Penggunaan Hak Pilih			Tingkat Parmas (%)		
					(DPT+DPTb+DPK)					
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Total
1	Kota Palembang	550.218	563.031	1.113.249	375.368	407.624	782.992	68,22	72,40	70,31
2	Kab OKI	245.042	231.821	476.863	188.283	186.405	374.688	76,84	80,41	78,62
3	Kab OI	141.150	140.582	281.732	91.542	100.801	192.343	64,85	71,70	68,28
4	Kab OKUT	232.171	223.231	455.402	178.815	177.851	356.666	77,02	79,67	78,34
5	Kab OKU	125.565	121.278	246.843	81.036	82.560	163.596	64,54	68,08	66,31
6	Kab OKUS	131.873	122.931	254.804	88.924	83.445	172.369	67,43	67,88	67,66
7	Kab Muara Enim	204.743	202.311	407.054	146.690	154.145	300.835	71,65	76,19	73,92
8	Kota Prabumulih	62.539	64.206	126.745	46.100	50.627	96.727	73,71	78,85	76,28

9	Kab PALI	60.301	60.881	121.182	38.331	42.978	81.309	63,57	70,59	67,08
10	Kab Lahat	148.024	144.307	292.331	108.894	111.505	220.399	73,57	77,27	75,42
11	Kab Empat Lawang	99.520	95.812	195.332	70.200	69.268	139.468	70,54	72,30	71,42
12	Kota Pagaram	51.859	50.023	101.882	43.872	42.563	86.435	84,60	85,09	84,84
13	Kab Musi Rawas	141.689	136.950	278.639	81.147	86.203	167.350	57,27	62,94	60,11
14	Kota Lubuklinggau	76.628	78.525	155.153	54.957	59.841	114.798	71,72	76,21	73,96
15	Kab Muratara	71.764	71.625	143.389	38.645	40.400	79.045	53,85	56,40	55,13
16	Kab Musi Banyuasin	220.559	212.690	433.249	135.898	139.965	275.863	61,62	65,81	63,71
17	Kab Banyuasin	290.478	282.306	572.784	200.428	205.387	405.815	69,00	72,75	70,88
	TOTAL	2.854.123	2.802.510	5.656.633	1.969.130	2.041.568	4.010.698	68,99	72,85	70,90

Sumber : PPID KPU Provinsi Sumatera Selatan

Table 4.2
Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada PILPRES 2019 Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih (DPT)			Penggunaan Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)			Tingkat Partas (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Total
1	Kota Palembang	557.261	568.826	1.126.087	448.711	476.834	925.545	80,52	83,83	82,17
2	Kab OKI	268.604	254.665	523.269	223.313	219.069	442.382	83,14	86,02	84,58
3	Kab OI	144.924	144.049	288.973	122.685	126.442	249.127	84,65	87,78	86,22
4	Kab OKUT	247.890	239.234	487.124	207.034	202.848	409.882	83,52	84,79	84,15
5	Kab OKU	131.010	127.052	258.062	110.656	108.768	219.424	84,46	85,61	85,04
6	Kab OKUS	139.139	129.960	269.099	118.562	109.200	227.762	85,21	84,03	84,62
7	Kab Muara Enim	209.915	207.611	417.526	178.838	180.216	359.054	85,20	86,80	86,00
8	Kota Prabumulih	64.536	66.655	131.191	55.625	59.265	114.890	86,19	88,91	87,55
9	Kab PALI	65.308	66.268	131.576	55.505	58.092	113.597	84,99	87,66	86,33
10	Kab Lahat	150.592	146.422	297.014	130.343	128.922	259.265	86,55	88,05	87,30

11	Kab Empat Lawang	101.957	98.468	200.425	85.349	83.721	169.070	83,71	85,02	84,37
12	Kota Pagarlalam	53.319	51.203	104.522	46.867	45.463	92.330	87,90	88,79	88,34
13	Kab Musi Rawas	147.171	142.373	289.544	125.283	122.782	248.065	85,13	86,24	85,68
14	Kota Lubuklinggau	79.449	81.436	160.885	65.656	69.432	135.088	82,64	85,26	83,95
15	Kab Muratara	74.488	74.190	148.678	62.747	63.191	125.938	84,24	85,17	84,71
16	Kab Musi Banyuasin	229.124	220.730	449.854	186.967	183.106	370.073	81,60	82,95	82,28
17	Kab Banyuasin	300.992	292.754	593.746	238.654	238.439	477.093	79,29	81,45	80,37
	TOTAL	2.965.679	2.911.896	5.877.575	2.462.795	2.475.790	4.938.585	83,04	85,02	84,02

Sumber : PPID KPU Provinsi Sumatera Selatan

Tabel diatas menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan agenda PEMILU. Salah satu indikator suksesnya agenda Pemilu yaitu dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas. Dari 17 kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan biasanya yang menjadi sorotan selalu Ibukota Palembang, berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sumatera Selatan bahwa Ditahun 2018 Partisipasi Pemilih Masyarakat Kota Palembang dalam Pilkada Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu (27/6/2018) yaitu 70,31%, sedangkan pada saat PILPRES 2019 partisipasi masyarakat lebih tinggi yang mana angka partisipasi tersebut mencapai 82,17%.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara Pemilu baik pada saat pilkada provinsi sumatera selatan 2018 maupun Pilpres 2019 telah bekerja semaksimal mungkin untuk mensukseskan agenda tersebut, mulai dari tahapan sosialisasi pemilu sampai ke proses pencoblosan one man one vote. Mengingat pada saat Pilpres 2019 secara bersamaan diselenggarakannya Pileg maka KPU Provinsi Sumsel membuat program baru dengan membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) untuk membantu kinerja KPU Sumsel dalam melakukan peningkatan partisipasi. Yang dilakukan oleh Relawan

Demokrasi dalam membantu kinerja KPU Provinsi Sumsel meliputi 10 (sepuluh) basis yaitu:

1. Pemilih Keluarga
2. Pemilih Pemula
3. Pemilih Pemuda
4. Pemilih Perempuan
5. Pemilih Dengan Penyandang Disabilitas
6. Pemilih Dengan Keterbutuhan Khusus
7. Kaum Marjinal
8. Komunitas
9. Keagamaan
10. Warga Internet

1. Basis Keluarga

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri lebih dari dua orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi.

Pada akhirnya semua basis pemilih yang ada di tengah-tengah masyarakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing. Kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis anggotanya dipenuhi melalui struktur keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, dan sebagainya (Pedoman Relasi Pemilu, 2019: 12).

2. Basis Pemilih Pemula

Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu berikutnya.

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah

17-21 tahun. Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai cakrawala yang luas diantara masyarakat. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi-sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat).

3. Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan sebagainya (Pedoman Relasi Pemilu, 2019: 14).

4. Basis pemilih perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya.

Pengalaman partisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik si anak, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa.

Gambar 4.1
Sosialisasi ke sanggar senam



Alasan menjadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah:

- Jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibanding laki-laki.
- Pemilih perempuan rentan dimobilisasi ketika pemilu maupun di luar pemilu.
- Tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu/emak-emak kompleks.

5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Contoh bentuk kegiatannya adalah ke komunitas/masyarakat penyandang disabilitas (Pedoman Relasi Pemilu, 2019: 15).

Gambar 4.2
Sosialisasi ke Panti Sosial



6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus

Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit di jangkau. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan sawit, dan masyarakat adat (Pedoman Relasi Pemilu, 2019:16).

7. Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggir, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin kota, pemulung.

8. Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen yaitu yang Pertama, berdasarkan lokasi, dimana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hoby.

Gambar 4.3
Sosialisasi ke Pedestrian Sudirman



Komunitas secara umum jauh dari aktivitas politik, tetapi mereka bukan berarti mereka miskin informasi politik. Tak jarang pula para anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini di tengah mereka menjalankan aktivitas di komunitasnya. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas masyarakat suku jawa, minang, bugis, dayak, papua dan lainnya.

9. Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak

tersentuh. Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan kedepan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi ke pemilu dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat berkolaborasi dengan kelompok keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah shalat jumat, jamaah gereja/pura/wihara/klenteng dan lain sebagainya.

10. Basis Warga Internet (Netizen)

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Melalui smartphone, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi. Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu di semua satuan kerja mesti membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twitter, facebook, instagram dan lainnya (Pedoman Relasi Pemilu, 2019: 18-29).

Gambar 4.4

Sosialisasi Sekaligus Konser Musik di Kambang Iwak



Segala upaya telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumsel untuk menyukseskan pemilu. Selain daripada kerja Relawan Demokrasi yang cukup Masif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di semua Sektor masyarakat, KPU juga tidak jarang melakukan sosialisasi dengan cara mengikuti trend masa kini untuk menarik millennial. Masyarakat millennial juga menjadi target dan sasaran partisipasi pemilu dikarenakan Indonesia menghadapi tantangan bonus demografi yang mana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi daripada penduduk yang usia tidak produktif.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak hanya melakukan sosialisasi hanya sebatas Voter Information namun lebih dari itu KPU juga melakukan Voter Education yang mana KPU Provinsi Sumsel juga melakukan Pendidikan Pemilih, mengapa mereka harus memilih, bagaimana jika mereka tidak memilih, bagaimana menjadi pemilih yang benar, hal tersebut semuanya sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan baik itu Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 maupun Pilpres 2019.

Berbeda dengan (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan yang tugasnya adalah melakukan pengawasan jalannya Pemilu pada Pilpres 2019 lebih banyak melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan komitmen Sebagai Penyelenggara Pemilu dalam bidang pengawasan, Pengawas yang dimaksud adalah pengawasan dalam kegiatan mengamati, memeriksa, mengkaji, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan Pengawasan bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya mengalami peningkatan cukup signifikan dengan struktur organisasi di tingkat Nasional berjumlah 5 orang, Bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang anggota, Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 atau 5 orang anggota, Panwaslu Kecamatan 3 orang anggota, Panwaslu Kelurahan/Desa 1 orang dan Pengawas TPS 1 orang pada setiap TPS. Terjadinya ketidak seimbangan ketika Jumlah SDM dikaitkan dengan objek pengawasan, maka alternatif

strategi untuk mengcover seluruh objek pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Strategi ini untuk mentransformasikan gerakan Moral menjadi gerakan sosial, tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara tapi semua pihak bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu berkualitas dan lahirnya kepemimpinan yang berkualitas. (Zamzami, wawancara, 4 Januari 2021).

Partisipasi masyarakat dalam Pengawas Pemilu adalah kegiatan untuk memastikan terlindungnya hak politik warga masyarakat, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya, mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik dan mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat.

Strategi dalam membangun Pengawasan partisipatif dengan perkembangan zaman digitalisasi ini adanya sebutan baru seperti generasi Millennial, dimana Millennial sebagai bagian dari masyarakat diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal Penyelenggaraan Pilkada serentak. Dari penghujung tahun desember 2018 sekaligus refleksi Pilkada 2018 menuju Pileg & Pilpres 2019, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah mulai aktif melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Tujuan dari sosialisasi ini untuk menyamakan persepsi seluruh stakeholder di Sumsel, dalam hal menyampaikan pengawasan pemilu agar tercipta pemilu yang damai dan berintegritas. Bawaslu juga banyak melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) termasuk didalamnya Bimtek peningkatan kapasitas pengawasan dan Bimtek Laporan Kekayaan Pejabat Negara. Bimtek laporan kekayaan sangat penting dilakukan dalam rangka transparansi agar Pemilu dapat berjalan dengan damai dan demokratis (www.sumsel.bawaslu.go.id akses 15 Februari 2021)

Gambar 4.5
Sosialisasi Begesah Peh



Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kota Palembang bersosialisasi di pedestrian Sudirman mengajak millennial untuk menjadi pengawas partisipatif. Indonesia menghadapi tantangan Bonus Demografi yang mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non produktif, bahkan penduduk usia produktif yang sering disebut Kaum Millennial itu juga cenderung tidak malu-malu dan kritis terhadap kondisi perpolitikan negeri ini, dalam politik generasi Millennial mempunyai sikap yang tegas dan tidak ragu-ragu untuk menyuarakan sikap politik mereka (<https://orator.id/2018/10/13/bawaslu-palembang-gelar-begesah-peh> akses 15 Februari 2021).

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis persiapan jelang Pemilu tahun 2019. Sebagai bentuk kesiapan dan keseriusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam mensukseskan Pemilu 2019 baik Pemilihan Legislatif (PILEG) maupun Pemilihan Presiden (PILPRES), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan Apel Siaga di Jakabaring Sport City dan mencetak rekor museum rekor Indonesia (Muri) dengan kategori Apel Persiapan Pemilu Terbanyak Tingkat Provinsi.

Gambar 4.6
Apel Siaga Pengawas Pemilu 2019



Dalam Apel Siaga Pengawas Pemilu 2019 tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga mengundang Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yaitu Bapak Wiranto, dalam agenda tersebut Bapak Wiranto bangga pada Provinsi Sumsel yang sudah melaksanakan apel siaga Pengawas Pemilu 2019 yang melibatkan ribuan peserta dari kalangan panitia pengawas pemilu. Ini membuktikan bahwa Provinsi Sumsel telah siap untuk menyelesaikan jalannya Pileg dan Pilpres 2019 dengan aman dan damai dalam mencari pemimpin yang berkualitas.

Beliau juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu sumsel khususnya panitia pelaksana karena telah sukses menggelar Apel Siaga Pengawas Pemilu terbesar se Indonesia, tidak ada satupun Provinsi yang mempunyai inisiatif seperti ini (<https://intens.news/jumlah-peserta-apel-kesiapsiagaan-pemilu-2019-pecahkan-rekor-sumsel> akses 15 Februari 2021).

B. Kecenderungan Persepsi Masyarakat Terkait Perbedaan Partisipasi Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan PILPRES 2019

Dalam pemilihan umum, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya Pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilihan Umum.

Untuk melihat kecenderungan Persepsi masyarakat, peneliti melakukan langkah dengan menyebarkan Kuesioner. Kuesioner ini bukan mewakili seluruh masyarakat Kota Palembang, namun kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data agar dapat melihat kecenderungan persepsi masyarakat terkait perbedaan partisipasi pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan PILPRES 2019.

Diagram 4.1
Responden Daerah Pemilihan



Sumber: Kuesioner Penelitian 2021

Diagram diatas adalah 100 Orang Responden Kuesioner Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan PILPRES 2019 di Kota Palembang dengan 6 Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu:

1. Dapil 1 (Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1, Ilir Barat II) 22%
2. Dapil 2 (Alang-Alang Lebar, Kemuning, Sukarame) 21%
3. Dapil 3 (Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III) 17%
4. Dapil 4 (Kalidoni, Sako, Sematang Borang) 15%

5. Dapil 5 (Plaju, Seberang Ulu II) 14%
6. Dapil 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) 11%

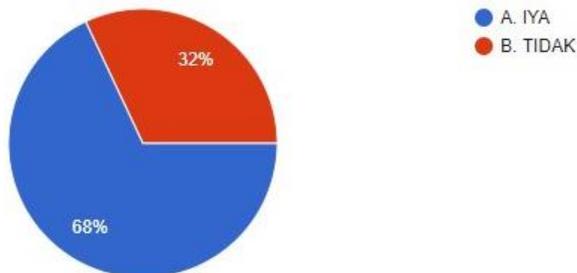
Kemudian 100 orang tersebut akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, adapun pertanyaannya sebagai berikut:

1. Apakah anda ikut berpartisipasi pada Pilkada Sumsel 2018 ?
 - a) Iya
 - b) Tidak
2. Jika anda ikut apa alasannya ?
 - a) Menjalankan hak sebagai warga negara
 - b) Merupakan kader partai
 - c) Adanya Reward dari peserta pemilu
 - d) Lainnya.....
3. Jika tidak ikut apa alasannya ?
 - a) Tidak adanya pilihan politik
 - b) Kecewa dengan pemilu sebelumnya
 - c) Kecewa dengan proses pemilu yang sedang berlangsung
 - d) Tidak mendapatkan kartu undangan pemilihan
 - e) Alasan teknis (lupa, soal jarak, sakit, dll)
 - f) Lainnya.....
4. Apakah anda ikut berpartisipasi pada Pilpres 2019 ?
 - a) Iya
 - b) Tidak
5. Jika anda ikut apa alasannya ?
 - a) Menjalankan hak sebagai warga negara
 - b) Merupakan kader partai
 - c) Adanya Reward dari peserta pemilu
 - d) Lainnya.....
6. Jika tidak ikut apa alasannya ?
 - a) Tidak adanya pilihan politik
 - b) Kecewa dengan pemilu sebelumnya
 - c) Kecewa dengan proses pemilu yang sedang berlangsung
 - d) Tidak mendapatkan kartu undangan pemilihan
 - e) Alasan teknis (lupa, soal jarak, sakit, dll)
 - f) Lainnya.....

Ketika pertanyaan tersebut nanti sudah terjawab, hasil dari jawaban pertanyaan tersebut yang akan digunakan peneliti sebagai pedoman ketika wawancara terhadap Stakeholder yang memiliki

kaitan dan bersentuhan langsung dengan Pemilu, seperti misalnya Pengamat Politik, Tokoh Partai Politik, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, dsb.

Diagram 4.2
Partisipasi Pemilih Pilkada Sumsel 2018



Sumber: Kuesioner Penelitian 2021

Diagram diatas adalah hasil survei peneliti pada Pilkada Sumsel dengan menyebarkan kuesioner partisipasi 100 responden untuk melihat kecenderungan masyarakat. Dapat dilihat bahwa persentase kecenderungan masyarakat yang ikut berpartisipasi pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 yaitu 68% sedangkan yang tidak ikut berjumlah 32%.

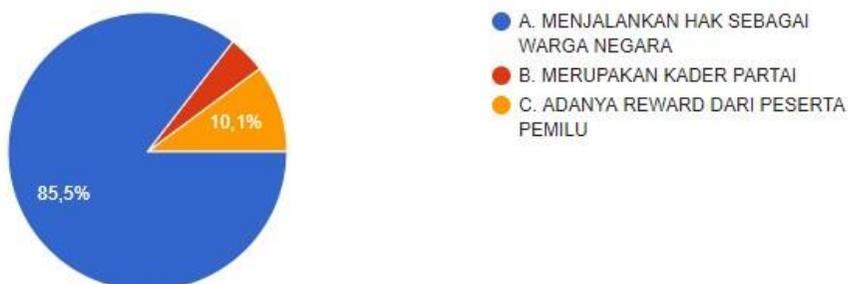
Diagram 4.3
Alasan Tidak Berpartisipasi Pilkada 2018



Sumber: Kuesioner Penelitian 2021

Apa yang menjadi alasan daripada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 yang terbesar yaitu tidak mendapatkan kartu undangan pemilihan, kemudian diikuti dengan alasan teknis (lupa,sakit,dll), tidak adanya pilihan politik dan kecewa dengan pemilu sebelumnya.

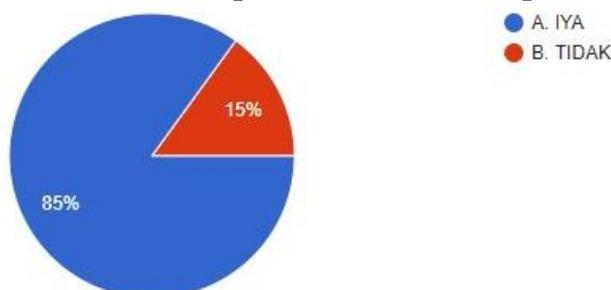
Diagram 4.4
Alasan Ikut Berpartisipasi Pilkada 2018



Sumber: Kuesioner Penelitian 2021

Sebagian besar masyarakat ikut berpartisipasi pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 85,5% dengan alasan menjalankan hak sebagai warga negara, kemudian ada juga yang ikut berpartisipasi dikarenakan dengan adanya Reward dari peserta pemilu 10,1% dan sisanya ikut berpartisipasi karena merupakan kader partai.

Diagram 4.5
Partisipasi Pemilih Pada Pilpres 2019



Sumber: Kuesioner Penelitian 2021

Pada saat Pilpres 2019 dikota Palembang dapat dilihat kecenderungan partisipasi masyarakat cukup tinggi bila dibandingkan dengan Pilkada Provinsi 2018 diatas yang hanya 68%. Berdasarkan hasil survei kuesioner Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan PILPRES 2019 di Kota Palembang, Partisipasi masyarakat pada Pilpres 2019 mencapai 85% sedangkan yang tidak ikut berpartisipasi 15%.

Diagram 4.6
Alasan Tidak Berpartisipasi Pilpres 2019



Sumber: Kuesioner Penelitian 2021

Apa yang menjadi alasan fundamental masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi pada Pilpres 2019 yaitu tidak mendapatkan kartu undangan pemilih sebesar 34,6%, diikuti dengan alasan teknis (lupa, sakit, dll) 26,9%, kemudian kecewa dengan Pemilu sebelumnya 23,1%, tidak adanya pilihan politik 7,7%, sisanya kecewa dengan proses pemilu yang sedang berlangsung dan ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jika dilihat dari alasan masyarakat pada survei tersebut masih cukup tinggi angka kekecewaan masyarakat terhadap Pilpres sebelumnya, Pilpres 2019 ini dianggap rematch dari Pilpres sebelumnya tahun 2014.

Diagram 4.7
Alasan Ikut Berpartisipasi Pilpres 2019



Sumber: Kuesioner Penelitian 2021

Sama halnya pada Pilkada 2018, Sebagian besar masyarakat ikut berpartisipasi pada Pilpres 2019 dengan alasan menjalankan hak sebagai warga negara, kemudian diikuti dengan adanya Reward dari peserta pemilu, dan sebagian kecil merupakan kader partai. Hanya saja yang membedakan pada Pilpres 2019 adanya Reward dari peserta Pemilu lebih tinggi mencapai 12,6%. Artinya Pilpres 2019 indikasi penggunaan money politik cukup massif.

Dalam wawancara dengan ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan, Ramlan Holdan (8 Februari 2021) mengatakan ada hal yang sangat besar mempengaruhi partisipasi masyarakat pada saat Pilpres 2019. Saya sebagai kader partai sekaligus ketua DPW PKB Sumsel yang mengusung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf bekerja semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya agar Capres dan Cawapres yang usung menang. Kami seluruh kader Partai PKB yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif satu intruksi dari pusat, untuk ikut mengkampanyekan Capres dan Cawapres Nomer Urut 1 (Jokowi - Ma'ruf Amin). Menurut hemat saya seluruh partai politik yang lain juga melakukan hal yang sama, terlebih pasangan calon presiden hanya 2 yang membuat seluruh partai politik terpusat dan bekerja keras untuk bagaimana caranya agar pasangan calon yang di usung partai bisa memenangkan kontestasi politik sehingga berbagai dinamika dibuat dan dikonsep untuk menaikkan elektabilitas, ditambah lagi sosialisasi dari stakeholder terkait seperti penyelenggara pemilu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta banyak instansi dan ormas-ormas yang juga membantu mensosialisasikan pemilu presiden 2019, hal itu juga berdampak cukup besar terhadap partisipasi masyarakat.

Suhu politik pada saat Pilpres 2019 jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pilkada atau Pilgub 2018, kalau Pilgub masyarakat banyak yang antipati dan pasangan calon yang cukup banyak membuat suara terpecah. Sangat berbeda dengan Pilpres yang semua elemen tergerak untuk merebut RI 1. Maka tidak heran pada saat Pilpres 2019 kemarin banyak pertengkaran akibat berbeda pilihan, sempat viral juga kemarin salah satu kader kita Abul Hasan Al-Asyari masuk siaran TV Nasional Trans 7 dalam acara Hitam Putih bertajuk pernikahan beda pilihan (Ramlan Holdan, wawancara, 8 Februari 2021).

Dari pendapat diatas mengatakan bahwa suhu politik pada saat Pilpres 2019 lebih tinggi daripada Pilkada 2018. Ada juga hal yang sangat besar mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pilpres 2019 yaitu, dorongan yang kuat dari tokoh dan kader partai politik yang optimis memenangkan pasangan calon yang diusung partainya, ditambah juga sosialisasi dari stakeholder terkait seperti penyelenggara pemilu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta banyak instansi dan ormas-ormas yang juga membantu mensosialisasikan pemilu presiden 2019.

Dalam wawancara dengan Pengamat Politik, Tareh Rasyid (26 Februari 2021) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tinggi pada saat Pilpres 2019 yaitu pertama adanya reuni 212, reuni 212 tersebut sangat massif memobilisasi massa, mendorong masyarakat untuk mencoblos, bukan hanya di Palembang yang tinggi partisipasinya termasuk juga di berbagai daerah. Faktor yang kedua yaitu karena aturan terbaru syarat mengusung calon minimal 20% kursi yang membuat Pilpres hanya 2 calon, maka mesin partai berjalan sangat masif, seluruh partai terfokus pada pilpres termasuk semua kader partai yang mencalonkan diri legislative di dorong untuk mengkampanyekan pilpres. Dan faktor yang ketiga sosialisasi dari KPU juga cukup massif ke berbagai elemen.

Berbeda dengan Pilkada Provinsi Sumsel atau Pilgub yang kemarin ada 4 pasangan calon, rekomendasi partai terbagi-bagi dan suaranya terpecah. Mesin Partai juga tidak bekerja dengan Masif seperti halnya Pilpres 2019. Saya juga mengamati ada kekecewaan dari masyarakat mengingat Dodi Reza yang baru saja dilantik menjadi Bupati sudah mau mencalonkan diri di Pilgub hanya membongceng nama orang tua, sehingga terkesan seakan meninggalkan tanggungjawab atau mengkhianati. Hal itu juga berdampak pada partisipasi masyarakat, karena rasa kecewa membuat masyarakat apatis (Tareh Rasyid, wawancara, 26 Februari 2021).

Dari pendapat diatas mengatakan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang Pertama yaitu reuni 212 yang sangat massif memobilisasi massa, mendorong masyarakat untuk mencoblos. Yang Kedua yaitu mesin partai

bekerja sangat massif dan yang ketiga kerja keras Kpu dalam mensosialisasikan pemilu ke berbagai elemen.

Adapun tanggapan dalam wawancara dengan salah satu Komisioner Bawaslu Sumatera Selatan, Syamsul Alwi, (16 Januari 2021) selain melakukan pengawasan terhadap Pemilu, Bawaslu juga melakukan pencerdasan pemilih, pencerdasan pemilih ini sangat penting. Pemilih cerdas itu ya memahami bahwa pemilu adalah sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya sehingga tidak berada pada Golongan Putih (Golput). Pemilih cerdas itu selain paham dengan visi-misi seorang calon, tidak terpengaruh dengan popularitas, dan juga secara materi yang lebih ke arah money politik. Pemilih cerdas juga tidak hanya sebatas mencoblos tetapi juga ikut dalam pengawasan partisipatif, ikut melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu.

Pemilu ditahun 2019 meningkat karena selain memang sosialisasi yang begitu kuat kemudian semangat perubahan, kalau incumbent maju dianggap kurang melakukan sebuah perubahan terhadap kesejahteraan rakyat, masyarakat akan mencari pilihan lain, itu yang menjadi salah satu faktor semangatnya. Ditahun 2019 juga masyarakat sudah partisipatif ketika ada indikasi pelanggaran sudah berani melapor, pada pemilu sebelumnya orang tidak berani melapor, atau berani melapor tetapi tidak berani menyampaikan bukti (Syamsul Alwi, wawancara, 16 Januari 2021).

Dari pendapat diatas mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab kenapa Pilpres 2019 lebih tinggi tingkat partisipasinya yaitu pemilih yang cerdas, dan semangat akan perubahan untuk Indonesia agar lebih baik.

Kemudian dalam wawancara dengan Ketua KPU Sumatera Selatan, Kelly Mariana, (7 Januari 2021) mengatakan pada saat Pemilu 2019 Pilpres jadi faktor utama yang meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat, bukan Pemilihan Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI Atau DPD RI, karena Pilpres 2019 pada saat itu head to head, masing-masing pasangan calon didukung oleh partai politik, jadi terpusatlah semua perhatian itu pada Pilpres. faktor yang kedua peningkatan partisipasi pemilih ini karena sosialisasi yang baik oleh semua KPU dan Jajarannya, sosialisasi ini dilakukan berbagai tahap 11 basis pemilihan mulai dari Pemilih Perempuan, Marginal, Disabilitas, Basis Keluarga dan bahkan ke

Pelosok Desa. KPU juga ada banyak macam sosialisasi, ada kpu goes to campus, kpu goes to school, ada juga kpu sosialisasi pengajian-pengajian ke gereja ke berbagai umat beragama seperti FKUB dsb.

Dan yang berikutnya faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih adalah peran partai politik, mereka mensosialisasikan diri mereka pribadi juga sekaligus mensosialisasikan presiden, kalau pemilih sudah datang ke tps yang niat awalnya tadi mau mencoblos calon anggota DPR saja mau gak mau juga harus mencoblos Presiden karena surat suaranya tetap diberikan. Kalau kita bandingkan dengan pilkada yang hanya untuk memilih gubernur saja, atau memilih bupati saja atau walikota saja jadi enggak ada yang namanya khusus membuat partisipasi lebih dominan untuk memilih, misalnya ada dua pemilihan yaitu pemilihan gubernur sumsel dan walikota kota Palembang itu juga menunjang, misalnya “aku mau memilih gubernur saja, atau aku mau memilih walikota saja enggak ada urusan sama gubernur” itu juga tetap sama ketika nantinya di TPS tetap harus mencoblos keduanya, jadi saling mengisi partisipasi, tetapi kan tidak banyak karena kalau 2019 itu semua partai politik tertumpu kesana karena ada Pilpres dan Pileg itu yang menyebabkannya menjadi tinggi (Kelly Mariana, wawancara, 7 Januari 2021).

Dari Pendapat diatas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya Partisipasi Masyarakat pada Pilpres 2019 itu ada 3 Faktor yang pertama karena Pilpresnya head to head yang membuat semua partai politik tertumpu kesana jadi semua perhatian terpusat ke Pilpres, yang kedua karena Sosialisasi semua KPU dan Jajarannya yang bagus dilakukan kesemua basis masyarakat sampai ke pelosok desa, komunitas dan forum kerukunan umat beragama, yang ketiga peran partai politik, kita tidak bisa menghilangkan peran partai politik, jadi peran partai politik dalam melakukan sosialisasi itu sangat besar, sehingga meminta masyarakat untuk menyoblos, itu sebenarnya untuk mencoblos presiden juga, mereka mensosialisasikan diri mereka pribadi juga sekaligus mensosialisasikan presiden.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Kapolda Sumatera Selatan, Irijend.Pol Eko Indra Heri (6 Desember 2020) mengatakan sebagai aparat kepolisian yang tugasnya mengamankan jalannya

Pemilu, kita harus selalu siap siaga. Kita terus mempersiapkan diri dan berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilu agar Pemilu tersebut dapat berjalan dengan damai, kondusif dan demokratis. Memang ada sedikit perbedaan yang kami lihat dan kami rasakan ketika Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Sangat wajar jika Pilpres 2019 tingkat partisipasinya lebih tinggi daripada Pilkada Provinsi Sumsel 2018 atau Pilgub, khususnya dikota Palembang saja kita bersinergi dengan TNI bekerja lebih keras dalam mengamankan jalannya Pemilu Presiden daripada Pilkada 2018.

Seluruh elemen masyarakat sangat antusias menyambut Pilpres 2019 tersebut, contohnya pada saat kampanye Pak Jokowi-Ma'ruf ramai sekali begitupun juga kampanye Pasangan Calon Prabowo-Sandi bahkan ampera sampai kami tutup dan arus lalu lintas dialihkan. Kampanye-kampanye tersebut butuh pengamanan yang ekstra, begitupun juga di hari pencoblosan, kita tetap mengawal sampai ke TPS agar pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kecurangan terhadap pemilu. Kami sebagai aparat kepolisian tidak terlibat dalam unsur politik, tugas kami hanya mengawal dan mengamankan jalannya Pemilu agar terciptanya Pemilu yang damai dan demokratis sesuai harapan rakyat dan amanat Undang-Undang.

Dari pendapat diatas mengatakan bahwa antusias masyarakat lebih tinggi pada saat Pilpres 2019, terbukti dari sisi pengamanan bila dibandingkan dengan Pilkada 2018 aparat kepolisian bersinergi dengan TNI bekerja lebih keras dalam mengamankan jalannya pemilu. Aparat kepolisian tidak terlibat dalam unsur politik, tugasnya hanya mengawal dan mengamankan jalannya Pemilu agar terciptanya Pemilu yang damai dan demokratis sesuai harapan rakyat dan amanat Undang-Undang.

Menurut Miriam Budiardjo (2008 : 367) partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya.

Menurut Weimer (dalam Sastroatmojo, 1995:91) setidaknya ada lima penyebab yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

1. Modernisasi disegala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.
2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarkan seluruh ide-ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.
4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan menyuarakan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu-isu kebebasan pers.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya

tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Hal lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat juga disebabkan soal ketimpangan yang muncul dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum Pemilu termasuk juga metode kampanye.

Pada dasarnya Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan Pilpres 2019 di Kota Palembang sama-sama meningkat dari Pemilu sebelumnya. Hanya saja bila dibandingkan angka partisipasi masyarakat itu lebih tinggi pada saat Pilpres. Adanya perbedaan antara tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 dan Pilpres 2019 di Kota Palembang dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya kerja keras dari Penyelenggara pemilu melainkan didorong oleh seluruh elemen dan lapisan masyarakat. Dari hasil wawancara, kuesioner dan data-data yang peneliti dapatkan semuanya berkaitan dengan teori partisipasi politik.

Masyarakat berharap penyelenggara Pemilu tetap konsisten dalam mengawal demokrasi, jangan sampai kesalahan dan kecurangan yang terjadi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat yang berakibat masyarakat menjadi antipati terhadap Pemilu. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sebuah kontestasi politik pada pemilihan umum adalah bukti keberhasilan Demokrasi di Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang sehingga lebih tinggi pada saat PILPRES 2019 daripada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018. Ukuran partisipasi tentu bukan hanya sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilu.

Selain daripada kerja keras Penyelenggara Pemilu dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ada peran Partai Politik yang sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilpres 2019. Mesin Partai bekerja sangat massif dikarenakan pada saat Pilpres 2019 hanya ada 2 Pasangan calon yang membuat seluruh Partai Politik tertumpu kesana. Baik kader partai, sayap partai, ormas islam, nasionalis dan seluruh elemen lapisan masyarakat juga bergerak dengan semangat akan perubahan Indonesia yang lebih baik. Bahkan muncul asumsi masyarakat bahwa Pilpres 2019 adalah rematch dari Pilpres 2014, maka tidak heran pada saat Pilpres 2019 banyak pertengkaran akibat berbeda pilihan dikarenakan masyarakat sangat berpartisipasi aktif dalam pemilu tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut yaitu:

1. Pemilih hendaknya tahu dan kenal dengan betul siapa calon dalam kontestasi politik baik pada Pilkada, Pileg maupun Pilpres yang akan dipilihnya, serta tahu bagaimana track record dari kandidat calon tersebut, jadi tidak hanya memilih berdasarkan siapa yang memberi uang, karena suara mereka dalam TPS yang hanya 5 menit menentukan nasib kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu 5 tahun.
2. Diharapkan agar Penyelenggara Pemilu tetap konsisten, lebih terbuka dan transparan dalam mengawal demokrasi, jangan

sampai kesalahan dan kecurangan terjadi sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat yang berakibat masyarakat menjadi antipati terhadap Pemilu. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sebuah kontestasi politik pada pemilihan umum adalah bukti keberhasilan Demokrasi di Indonesia.

3. Kemudian untuk masyarakat Kota Palembang terkhusus pemuda sebagai Iron Stock dan Agent Of Social Control diharapkan dapat ikut serta secara aktif dalam berpartisipasi pada kegiatan politik yang ada di Kota Palembang Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chilcote, Ronald H. (2007). *Teori Perbandingan Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Haris, Syamsudin ed. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press
- Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution (2015). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer Edisi Ketiga*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Legality, Tim. (2017). *Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2019*, Yogyakarta: Legality
- Mariana, Dede. (2001). *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Rachmat, Kriyantono. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Malang: Prenada Media Group
- Rasyid, Tarech. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Partisipasi Politik*, Semarang : IKIP Semarang Press.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia.
- Sutopo, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Pres

2. Jurnal

Huda, Khoiril. (2018). *Pilpres 2019 : Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang

Pemilu, Rumah Pintar. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi) Pemilu*, Sumsel: Komisi Pemilihan Umum

Rahmadani, Wahyu. (2010) *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boga Kabupaten Kendal*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Triono. (2017). *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Wacana Politik

3. Internet

<https://id.wikipedia.org/Pemilihan-umum-di-Indonesia> akses 22 Februari 2021

<https://intens.news/jumlah-peserta-apel-kesiapsiagaan-pemilu-2019-pecahkan-rekor-sumsel> akses 15 Februari 2021

<https://nasional.kompas.com/beda-kecurangan-pemilu-era-orde-baru-dan-reformasi> akses 21 Februari 2021

<https://orator.id/2018/10/13/bawaslu-palembang-gelar-begesah-peh> akses 15 Februari 2021

www.kpu.go.id akses 20 Februari 2020

www.sumselprov.go.id, akses 5 Januari 2021

www.sumsel.bawaslu.go.id akses 15 Februari 2021

PEDOMAN WAWANCARA

Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 Dan Pilpres 2019 Di Kota Palembang

1. Bagaimana tanggapan anda setelah melihat kecenderungan partisipasi masyarakat kota Palembang yang lebih tinggi pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 Daripada Pilpres 2019 dalam kuesioner penelitian yang telah disebar ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat kota Palembang lebih tinggi pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2018 Daripada Pilpres 2019 ?
3. Apakah Penyelenggara Pemilu sudah bekerja dengan maksimal ?
4. Siapa saja yang berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilpres 2019 sehingga lebih tinggi daripada Pilkada 2018 ?

DOKUMENTASI

Dokumentasi ini berupa foto terakhir setelah melakukan wawancara bersama Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder terkait seperti Pengamat Politik, Tokoh Parpol dsb.

1. Ibu Kelly Mariana Ketua Komisioner KPU Sumatera Selatan



2. Bapak Syamsul Alwi Komisioner Bawaslu Sumatera Selatan



3. Bapak Ramlan Holdan Ketua DPW PKB Sumatera Selatan



4. Bapak Irjend.Pol Eko Indra Heri Kapolda Sumatera Selatan



5. Bapak Tareh Rasyid Pengamat Politik sekaligus Rektor UIBA





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B. 1505 /Un.09/VIII/PP.01/12/2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Satria Prima*, tanggal 25 Agustus 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2018;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Yenrizal, M.Si.	197401232005011004	Pembimbing I
Yulion Zalpa, MA.	198807072019031011	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : **Satria Prima**
N I M : **1657020116**
Prodi : **Ilmu Politik**
Judul Skripsi :

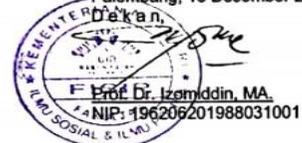
"Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dengan PILPRES 2019 di Kota Palembang."

Masa bimbingan : **Satu Tahun TMT. 18 Desember 2020 s/d 18 Desember 2021**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 18 Desember 2020



- Tembusan:
1. Rektor;
 2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
 3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
 4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
 5. Arsip;



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Satria Prima
 NIM : 1657020116
 Judul : PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA
 PALEMBANG
 Dosen Pembimbing : Dr. YENRIZAL S.Sos.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-09-13 06:19:07	Revisi Proposal Skripsi Setelah Seminar Proposal	Lihat catatan pada naskah dan perbaiki. Seluruh model pengutipan harus merujuk pada buku pedoman terbaru, begitu pula cara penulisan lainnya. Semua harus merujuk pada buku pedoman skripsi 2020.
2	2020-09-30 11:44:32	Bimbingan kedua setelah Revisi	Saya sudah cek naskah anda, tapi belum ada perubahan sama sekali dari perbaikan yang disampaikan sebelumnya. Perbaiki dulu dan lihat catatan bimbingan sebelumnya
3	2020-11-03 16:01:13	Bimbingan ketiga revisi proposal skripsi	1. Seluruh tabel harus punya judul tabel dan nomor tabel, dilengkapi dengan sumber tabel. 2. Teknik pengutipan harus intrateks (pedoman 2020) 3. LB harus juga menjelaskan mengapa memilih Palembang, dibandingkan dengan daerah lainnya. 4. Teori diperbaiki. Dilarang memasukkan definisi kamus dalam Teori karena bukan Teori. Perkuat dan pastikan teori Partisipasi politik mana yang dipakai 5. Penelitian ini bukan penelitian kepustakaan, tapi field research. baca baik bagian metodologi, banyak yang bertolak belakang
4	2020-11-12 00:45:35	Revisi merujuk ke aturan terbaru	1. Beberapa hal pada latar belakang bersumber dari referensi, tapi tidak ada dituliskan referensinya (indikasi plagiat) 2. Teori perlu menegaskan lebih jauh tentang partisipasi politik, khususnya aspek yang mempengaruhi dan hubungkan dengan apa yang diteliti (tidak hanya penjelasan teoritis belaka). Tinggi rendahnya partisipasi disebabkan banyak hal, terutama soal penegakan hukum, kepercayaan pada pemerintah, metode kampanye dll. Ini harus dijelaskan dan hubungkan dengan objek riset yang akan dibahas
5	2020-11-16 11:32:09	Revisi	Lanjut dulu ke proses berikutnya, truskan ke pembimbing 2, kekurangan akan disesuaikan pada proses berikutnya
6	2021-01-07 11:31:42	Bab II	Fokus penelitian dan lokasi penelitian bukan pada KPU atau BAWASLU, lembaga itu hanya sebagai sumber data saja. Lihat pertanyaan penelitian kamu, lokasinya dimana harusnya. Untuk mengetahui partisipasi politik, harusnya pada masyarakat yang berpartisipasi

7	2021-01-25 05:40:47	Revisi BAB II	1. Teknik pengutipan banyak salah, (perbaiki semua) 2. Penomoran sub bab harus mengikuti buku pedoman 3. Tidak boleh pakai singkatan yang tidak baku, misalnya PIPLRES dan PILKADA 4. Lokasi penelitian bukan KPU atau Bawaslu, paham judul kamu. Jika tidak paham judul kamu tidak bisa masuk ke bab berikutnya 5. Perlu ada kuesioner dalam teknik pengumpulan data. Sifatnya adalah melihat kecenderungan persepsi masyarakat mengapa berbeda partisipasinya pada pemilu. Kuesioner ini bukan mewakili seluruh warga Palembang, tapi melihat kecenderungan saja, jadi cukup 100 orang saja di survey
8	2021-02-03 10:51:29	Bab II	Lihat catatan sebelumnya, perbaiki sesuai catatan. Khususnya lokasi penelitian. Lokasi bukan pada KPU atau Bawaslu, tapi masyarakat Sumsel dan Stakeholder terkait (siapa itu, harus dijelaskan). Untuk lokasi penelitian cukup disebutkan pada masyarakat Sumsel dengan sumber data pada instansi terkait khususnya KPU/Bawaslu. Bab II tidak hanya menggambarkan Sumsel, tapi terpenting adalah partisipasi politik di Sumsel
9	2021-02-08 22:56:25	Revisi Bab II	Silahkan lanjutkan BAB berikutnya. Perhatikan jumlah bab, lihat pedoman penulisan terbaru (2020) yang mencakup 5 bab, bukan 4
10	2021-02-16 12:39:11	Revisi sebelumnya dari 4 bab menjadi 5 bab. Mohon sedikit arahnya bapak terkait pengisian kuesioner untuk bab III, seperti misalnya pertanyaan yg diajukan dsb.	Buat kuesioner pakai google form, buat juga pedoman pertanyaan untuk narasumber. Bab II berjudul Dinamika Pemilu dan Partisipasi Masyarakat. Sub Babnya A. Dinamika Pemilu dan Permasalahan-Persoalan Yang Timbul, B. Pemilu Langsung dan Partisipasi Masyarakat
11	2021-03-01 12:04:26	Revisi	1. Setiap tabel, bagan, diagram harus mencantumkan sumber di bawahnya. Jika sumbernya adalah kuesioner maka dibuat Sumber : Kuesioner penelitian 2021. 2. Pada beberapa diagram (terutama diagram 4.3, 4.4., 4.5), cek juga diagram lainnya, terdapat inkonsistensi pilihan jawaban dengan judul diagram. Jika judulnya adalah alasan ikut pemilu, maka tidak mungkin ada pilihan jawaban SAYA TIDAK IKUT MEMILIH. Perhatikan betul aspek ini, karena akan dianggap anda hanya sembarangan buat kuesioner. Pada diagram 4.3, ada dua pilihan jawaban yang sama. Pada diagram 4.6 ada pilihan jawaban IKUT, itu inkonsistensi dengan judul diagram 3. Seluruh kutipan langsung (yang menggunakan kata-kata SAYA) harus dibuat satu spasi dan dicantumkan tanggal dan siapa yang diwawancarai.
12	2021-03-05 16:35:37	Revisi	Silahkan lanjutkan. Hati-hati plagiarism, karena akan di cek dengan Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Kh. Zainal Abidin Fiki No.1 Km 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 354668 Website. www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : Satria Prima
NIM : 1657020116
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018
Dengan Pilpres 2019 Di Kota Palembang
Pembimbing I : Dr. Yenrizal, M.Si
Pembimbing II : Yulion Zalpa, MA

No	Hari/ Tanggal	Uraian Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Selasa, 3 Nov 2020	Bimbingan Bab I Revisi Latar Belakang Masalah dan Penulisan	
2	Kamis, 12 Nov 2020	Perbaiki lagi teknik penulisan dan masukan sumber pada seluruh tabel	
3	Senin, 16 Nov 2020	Acc dan lanjut Bab berikutnya	
4	Selasa, 5 Januari 2021	Teknik pengutipan kaca pedoman terbaru menggunakan intra teks	
5	Jum'at, 19 Januari 2021	Lanjut Bab berikutnya	
6	Rabu, 10 Feb 2021	Perkuat lagi analisis pada Bab Hasil dan Pembahasan	
7	Senin, 2 Maret 2021	Acc silahkan lanjutkan Ujian Komprehensif selanjutnya Muraqosyah	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B. 82./Un.09/VIII/TL.01/01/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua KPU Sumatera Selatan
Di
Palembang

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Satria Prima
Alamat : Jalan Panca Usaha Taman Gandaria Permai No. A1 Palembang.
NIM : 167020116
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : **Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dengan PILPRES di Kota Palembang**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 Januari 2021

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 11/HM.03.4-SD/16/Prov/I/2021 Palembang, 15 Januari 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
di -
Palembang.

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B.82/Un.09/VIII/TL.01/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Mohon Izin Penelitian untuk penelitian/ observasi/ wawancara/ pengambilan data guna penulisan skripsi atas nama :

Nama : Satria Prima
NIM : 167020116
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 dengan PILPRES di Kota Palembang

Pada prinsipnya KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ observasi/ wawancara/ pengambilan data guna penulisan skripsi di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih KETUA,

AMRAH MUSLIMIN, SE., MSi

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Satria Prima
Nim : 1657020116
Tanggal Ujian Munaqosah : 8 Juni 2021
Judul Skripsi : Perbandingan Tingkat Partisipasi
Politik Masyarakat Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan
2018 Dengan PILPRES 2019 Di Kota Palembang

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA
SAAT UJIAN MUNAQOSAH DAN TELAH DISETUJUI OLEH
DOSEN PENGUJI I DAN DOSEN PENGUJI II.

NO	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.HI	Penguji I	
2	Erik Darmawan, M.HI	Penguji II	

Palembang, 10 Juni 2021

Menyetujui,



Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si
Dosen Pembimbing I



Yulion Zalpa, MA
Dosen Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang

SURAT KETERANGAN

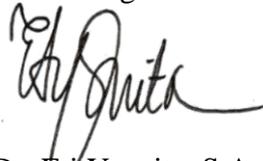
Yang bertandatangan di bawah ini kami Ketua dan atau Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Satria Prima
NIM : 1657020116
Program Studi : Ilmu Politik
Juduk Skripsi : *Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada PILKADA Provinsi Sumatera Selatan 2018 Dengan PILPRES 2019 Di Kota Palembang*

Telah menyelesaikan Revisi Perbaikan Skripsi, Penjilidan Skripsi, Cek Plagiasi, dan menyerahkan Sooftcopy serta jurnal dalam bentuk CD. Seluruh komponen tersebut telah diverifikasi oleh pihak prodi. Oleh karenanya, dimohonkan kepada bagian akademik untuk menerbitkan ***Surat Keterangan Bebas Administrasi.***

Demikian untuk dapat diperhatikan dan diproses, terima kasih.

Palembang, 10 Juni 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Politik



Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.HI
NIP. 197409242007012016